

Penolakan Parlemen Inggris Terhadap Kebijakan *Backstop* Irlandia

Stefania Lowirani¹, Suyani Indriastuti², Pra Adi Soelistijono³

lowiranifani@gmail.com

Abstract

The Irish Backstop is a protocol in the 2018 (rejected) draft of the Withdrawal Agreement, which would leave the UK (in general) in the EU Customs Union and Northern Ireland (in particular) in some aspects of the European Single Market, until a solution is found to prevent hard borders. The aim is not to compromise the Good Friday Agreement and to maintain the integrity of the European Single Market. It will enter into force only if no other solution exists by the end of the (agreed upon) transition period, and will remain in effect until such a solution is found and agreed to be practical. However, the backstop policy was rejected by the British Parliament which resulted in the resignation of Theresa May as British Prime Minister. By using constructivism and postfunctionalism theory, the author analyzes the reasons for the British Parliament's rejection of the Backstop Policy.

Keywords: *Brexit, Irish Backstop Policy, UK Parliament, UK-Ireland, European Union*

1. Pendahuluan

Setelah Brexit, hukum Uni Eropa dan Pengadilan Uni Eropa tidak lagi memiliki hak atas hukum Inggris, kecuali di wilayah tertentu yang terkait dengan Irlandia Utara. Undang-Undang (Penarikan) Uni Eropa tahun 2018 mempertahankan hukum UE yang relevan sebagai hukum domestik, yang sekarang dapat diubah atau dicabut oleh Inggris (Hayes, 2021). Dampak yang paling dirasakan akibat adanya Brexit adalah Pemerintah Irlandia Utara yang menjadi bagian dari Persemakmuran Inggris dan Republik Irlandia (mencakup wilayah Irlandia Selatan) yang menjadi bagian dari Uni Eropa. Saat Inggris masih menjadi bagian dari Uni Eropa, tidak ada pemeriksaan bea cukai atau peraturan atas barang yang lewat antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. (European Council, 2020) Hal itu karena pasar tunggal Uni Eropa dan pengaturan serikat pabean memudahkan orang, barang dan jasa untuk melintasi perbatasan, dengan kedua negara mengikuti seperangkat aturan yang sama. Tapi, setelah Brexit, peraturan tersebut dapat berubah. Kedua bagian pulau Irlandia dapat berada dalam rezim peraturan yang berbeda. Hal ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan kesenjangan antara kedua belah pihak jika tidak adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah tersebut (Perez-Pena, 2019).

Parlemen Inggris mempertimbangkan kebijakan Brexit sebagai pemicu kembali konflik perbatasan antara Republik Irlandia dengan Irlandia Utara. Maka, pemerintahan Theresa May mengeluarkan kebijakan *Backstop* sebagai solusi untuk meredam konflik di wilayah Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Solusi *Backstop* yang ditawarkan oleh pemerintahan Theresa May menekankan pada pasar ekonomi Inggris tetap di bawah serikat pabean Eropa dalam jangka waktu yang tak terbatas

^{1,2,3} Universitas Jember

hingga Inggris dan Uni Eropa menemukan jalan keluar dari Brexit dan memaksa untuk memberlakukan tarif yang sama dengan negara – negara Eropa yang lain. Dengan adanya Irlandia Utara berada di bawah pengawasan Uni Eropa membuat barang atau jasa yang berasal dari Eropa masuk ke dalam wilayah Irlandia tidak akan dikenakan sesi pemeriksaan. Namun, apabila terdapat barang atau jasa dari Inggris masuk ke dalam wilayah Irlandia Utara maka akan diberlakukan proses pemeriksaan (Saputra, 2019).

Faktanya adalah dengan atau tanpa kesepakatan Brexit, Buku Putih Brexit telah menegaskan bahwa Inggris harus berada di luar Pasar Tunggal Uni Eropa dan Serikat Pabean. Hal ini berarti perbatasan fisik akan muncul kembali di pulau Irlandia. Hal ini adalah prospek yang tidak menyenangkan karena ingatan kelam akan periode “*Troubles*”, yaitu konflik berdarah Irlandia Utara yang dipicu oleh bentrokan di wilayah perbatasan pada akhir tahun 1960-an. Bentrokan ini terjadi antara mayoritas penganut Protestan Inggris dan penduduk minoritas Katolik atau nasionalis Irlandia. Selama bertahun-tahun, keanggotaan Inggris dan Irlandia di UE menghilangkan perbatasan yang memisahkan keduanya. Upaya ini berhasil mengakhiri “*Troubles*” dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998,. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa seluruh perbatasan Irlandia bebas (Jarvis, Collier, & Herbert, 2019).

Pendekatan kasar yang diambil dalam kesepakatan Brexit melanggar Perjanjian Jumat Agung. Usulan Theresa May adalah solusi ‘*backstop*’ untuk perbatasan Irlandia dalam kesepakatan Brexit. *Backstop* adalah lampiran yang sudah tidak berlaku untuk rancangan perjanjian penarikan Brexit yang dikembangkan oleh pemerintah May dan Komisi Eropa pada bulan Desember 2017 dan diselesaikan pada bulan November 2018, yang bertujuan untuk mencegah perbatasan yang jelas (satu dengan kontrol bea cukai) antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara setelah Brexit. *Backstop* akan mengharuskan Irlandia Utara tetap berada di beberapa aspek Pasar Tunggal, sampai pengaturan alternatif disepakati antara UE dan Inggris. Proposal tersebut juga mengatur agar Inggris secara keseluruhan memiliki wilayah pabean yang sama dengan UE hingga solusi diberikan untuk menghindari perlunya kontrol bea cukai di Inggris (antara Irlandia Utara dan Inggris Raya). Elemen ‘*backstop*’ adalah bahwa pengaturan tersebut akan terus berlaku secara potensial tanpa batas waktu kecuali jika Inggris dan UE sama-sama menyepakati pengaturan yang berbeda, misalnya pada perjanjian perdagangan antara Inggris dan UE pada akhir masa transisi. Ini berarti Irlandia Utara akan tetap tunduk pada kerangka hukum Uni Eropa dan akan tetap terpisah dari Inggris untuk waktu yang tidak terbatas sehingga Parlemen Inggris menentang solusi Theresa May ini (O’Carroll, 2019). Penolakan ini dibuktikan dalam pemungutan suara yang diselenggarakan pada 14 Januari 2019 dengan hasil 432 suara menolak klausul *Backstop* banding 202 suara setuju dengan kesepakatan tersebut. Hasil yang sama juga diperoleh dari pemungutan suara yang diselenggarakan pada Maret 2019 dengan perbandingan 149 suara. Sebanyak 238 suara anggota partai buruh, 75 anggota partai konservatif, 35 anggota partai nasional skotlandia, 11 anggota partai demokrat liberal menolak kebijakan tersebut. Diikuti penolakan dari beberapa anggota partai *plaid cymru* dan partai hijau. Penolakan dari mayoritas anggota parlemen Inggris tetap berlanjut pada pemungutan suara selanjutnya. Diketahui 118 anggota partai konservatif, yang merupakan partai pemimpin, menolak kebijakan tersebut (BBC, 2019).

Akibat adanya kesenjangan antara kebijakan *Backstop* dari Perdana Menteri Theresa May dan penolakan yang dilakukan oleh Parlemen Inggris seperti yang telah

dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh alasan penolakan kebijakan *Backstop* oleh Parlemen Inggris. Penelitian ini menarik untuk diteliti ketika solusi kebijakan backstop yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Theresa May untuk menghindari konflik di perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia akibat dampak yang ditimbulkan oleh adanya Brexit mendapat penolakan dari Parlemen Inggris hingga mengakibatkan mundurnya Theresa May dari jabatan Perdana Menteri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menganalisis alasan penolakan kebijakan *Backstop* oleh Parlemen Inggris.

2. Metodologi

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis mendapatkan data yang akan digunakan dalam menganalisis sebuah masalah dalam penelitian (Suryana, 2012). Berdasarkan cara memperoleh data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian atau analisa dari pihak lain yang terlibat langsung dalam bentuk sebuah berita, jurnal, hingga buku. Selain itu, pengumpulan data sekunder diperoleh dari ragam informasi faktual lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan bersumber dari media internet. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan tersebut diperoleh melalui: Publikasi Ilmiah (Jurnal-jurnal internasional), buku-buku atau *e-book*, *Report* yang dikeluarkan oleh lembaga nasional maupun internasional, situs resmi pemerintah maupun organisasi internasional. Dengan data sekunder yang telah diperoleh kemudian penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab hambatan perlindungan anak di Ghana. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis yang pada akhirnya dideskripsikan hingga membentuk suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang sudah dianalisis sebelumnya.

Kerangka Konseptual

Pada penulisan karya ilmiah, kerangka konseptual diperlukan sebagai instrumen yang diperlukan penulis untuk menganalisis dan melakukan penelitian. Dalam sub-bab kerangka konseptual ini, penulis akan menyebutkan teori-teori yang dianggap dapat dijadikan alat analisis untuk memecahkan permasalahan yang sudah disebutkan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruktivis dan postfunctionalism.

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis dalam studi hubungan internasional yang populer pada tahun 1990an, setelah berakhirnya Perang Dingin. Seiring munculnya aktor-aktor non-negara, juga berkembangnya isu-isu internasional menjadi salah satu faktor dari dilirikannya pendekatan ini. Ketidakmampuan neo-realis dan neo-liberalis dalam menjelaskan isu-isu internasional yang berkembang menjadikan konstruktivis sebagai alternatif dalam penjelasan isu-isu tersebut. Neo-realis dan neo-liberal hanya dapat mengeksplorasi bagaimana kepentingan itu dapat terwujud, tapi tidak dapat menjelaskan bagaimana suatu kepentingan itu terbentuk (Guzzini, 2000).

Konstruktivisme hadir sebagai reaksi terhadap realisme terutama kritiknya terhadap neorealis. Teori neorealis berfokus pada bagaimana distribusi kekuatan material, seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi, mendefinisikan keseimbangan kekuatan antar negara dan menerangkan perilaku antar negara. konstruktivis menolak fokus materi satu sisi tersebut. Konstruktivisme berfokus pada kesadaran manusia dan tempatnya di dunia (Jackson, 2007). Menurut konstruktivis aspek hubungan internasional yang paling penting adalah sosial bukan material. Mereka berpendapat bahwa dunia sosial, politik termasuk hubungan internasional bukanlah identitas fisik atau objek material yang berada diluar kesadaran manusia. Akibatnya, studi Hubungan Internasional harus berfokus pada ide dan keyakinan yang menginformasikan dikancah internasional serta saling memahami antar mereka (Waltz, 1979).

Konstruktivis melihat dunia sebagai sebuah proyek yang sedang dikerjakan, seperti menjadi apa bukan apa adanya. Konstruktivisme juga percaya bahwa sistem internasional bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya melainkan sistem internasional hanya ada sebagai kesadaran intersubjektif atau pemahaman umum diantara orang-orang; dalam makna itu sistem internasional disusun dalam ide-ide, bukan oleh kekuatan material. Sistem internasional merupakan rangkaian ide, kerangka pemikiran, sistem norma yang telah disusun oleh orang-orang tertentu di waktu dan tempat tertentu. Jika pemikiran dan ide yang masuk ke dalam kebenaran hubungan internasional berubah, maka sistem itu sendiri juga akan berubah, karena sistem terdiri dari pemikiran dan ide (Smith, 2005).

Karena sistem internasional itu bersifat relatif dan hasil bentukan bersama, maka dapat diubah bila manusia mulai memikirkan cara baru dan mendukung norma-norma baru yang secara radikal berbeda dengan yang lama. Terkonstruksi berarti bahwa dunia muncul terkonstruksi melalui proses interaksi antar agen-agen (individu, negara, dan NGO) dengan struktur lingkungan yang lebih luas. Ada proses saling mempengaruhi antar agen-agen dan struktur melalui proses deliberasi (musyawarah), argumentasi dan konsep-konsep lain (Adler, 1997). Konstruktivisme dibagi ke dalam tiga aspek umum, yaitu:

1. Intersubjective Understanding

Para konstruktivis memfokuskan pada dimensi intersubjektif dari pengetahuan karena mereka ingin menjelaskan aspek sosial dari keberadaan manusia, peranan ide-ide bersama sebagai struktur ide yang membatasi dan membentuk perilaku. Konstruktivis mengasumsikan adanya struktur sosial. Dalam konteks ini konstruktivis juga bersifat empiris, namun yang diamati bukan dunia atau struktur material, tetapi struktur ide para subyek yang mendefinisikan hubungan internasional.

2. Hubungan Struktur ide dan Perilaku aktor

Struktur internasional bagi kalangan konstruktivis memiliki pengaruh yang membentuk dan mengatur, bukan pengaruh langsung yang bersifat kausalitas terhadap aktor-aktor. Struktur ini juga mengarahkan aktor untuk mendefinisikan kembali kepentingan dan identitas mereka dalam proses (sewaktu proses) interaksi (dan para aktor menjadi tersosialisasi oleh proses). Struktur idealis ini membentuk para aktor mendefinisikan dirinya siapa mereka, tujuan mereka, dan peran yang mereka yakini harus mereka lakukan.

3. Hubungan Agen dan Struktur

Struktur ideasional dan aktor-aktor atau agen-agen saling membentuk dan menentukan satu sama lain. Struktur membentuk kepentingan dan identitas aktor tetapi struktur juga diproduksi, direproduksi dan diubah melalui praktik terus menerus dari para agen. Sehingga, berbeda dengan neo-realis yang melihat bahwa aktor tak dapat melakukan sesuatu dalam struktur kecuali merespon, konstruktivis mengatakan bahwa struktur eksis melalui interaksi timbal balik para aktor. Oleh karena itu, agen melalui tindakan sosial dapat merubah struktur. Mereka karenanya dapat beremansipasi untuk menggantikan praktik konfliktual yang dilakukan negara-negara kepada praktik-praktik yang lebih bersahabat.

Sebagai teori alternatif dalam studi HI, konstruktivisme memiliki fokus dan asumsi dasar yang berbeda dengan teori arus utama. Neorealisme, misalnya, cenderung berfokus pada aspek material (kekuatan militer dan kemampuan ekonomi) dalam menentukan keseimbangan kekuatan antarnegara, serta menjelaskan perilaku diantaranya. Sebaliknya, konstruktivisme berpendapat bahwa aspek hubungan internasional yang paling penting adalah dunia sosial (Jackson & Sorensen, 2014).

Sedangkan asumsi konstruktivisme seperti dinyatakan Jackson dan Sørensen bahwa, “sistem internasional tidak ada dengan sendirinya, sistem internasional hanya ada sebagai kesadaran intersubjektif di antara aktor dalam sistem tersebut”. Artinya, sistem internasional dibentuk berlandaskan pemahaman-bersama para aktor (negara/nonnegara) yang terlibat dalam dinamika kebijakan tersebut.

Menurut Alexander Wendt, konstruktivisme adalah sebuah teori struktural yang didasarkan pada asumsi bahwa aktor digabung secara sosial. Asumsi dasar dari konstruktivis yaitu, ide (gagasan), norma, dan identitas, merupakan aspek non-materil yang dapat membentuk tindakan suatu aktor dalam hubungan internasional. Identitas adalah dasar dari *interest* (kepentingan), yang mana akan menentukan action (tindakan). Hal ini menjelaskan kepentingan negara terbentuk sesuai identitas negara tersebut, yang mana identitas itu sendiri dibentuk oleh aktor-aktor di dalam negara tersebut melalui ide, gagasan, dan norma yang ada. Konstruktivis tidak mengabaikan pengaruh dan peran kekuatan materil (Kapabilitas militer, ekonomi, dan sebagainya), namun beranggapan bahwa seperangkat ide yang tertuang dalam norma internasional turut menentukan bagaimana aktor-aktor bertindak di dunia internasional. Aktor negara maupun non-negara dianggap sebagai Agent dan dunia internasional sebagai Structure, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya aktor itu sendirilah yang menciptakan tatanan dunia internasional melalui ide, gagasan, serta norma yang disepakati (Wendt, 1999).

Konstruktivis mengedepankan makna dan interpretasi bersama sebagai komponen analitis esensial dibalik tindakan para aktor. Hal ini dapat terlihat dari asumsi konstruktivis bahwa struktur non-materil dapat mempengaruhi cara berfikir aktor dalam menentukan tindakan apa yang dapat diambil dan tindakan apa saja yang tidak dapat diambil dalam mencapai mencapai suatu tujuan (Wendt, *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*, 1992). Misalnya : negara A menganggap negara B sebagai sekutu, jadi tidak masalah membiarkannya melakukan produksi senjata, akan tetapi negara A menganggap negara C sebagai musuh, jadi melarang negara C dalam melakukan produksi senjata karena dianggap dapat mengancam negara A.

Postfunctionalism

Asumsi dasar *postfungsionalism* menurut Hooge dan Marks adalah (a) integrasi Eropa telah dipolitisasi dalam pemilihan umum dan referendum, (b) sebagai akibatnya, preferensi masyarakat umum dan partai politik nasional menjadi penentu hasil yurisdiksi, (c) dan identitas sangat penting dalam membentuk kontestasi di Eropa. Hooghe dan Marks (2008) menyajikan teori pascafungsionalisme integrasi Eropa untuk memahami perkembangan baru dalam politik Eropa yang tidak dapat dijelaskan oleh neo-fungsionalisme maupun antar pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa sementara integrasi regional mungkin dipicu oleh ketidaksesuaian antara efisiensi dan struktur otoritas yang ada, hasilnya adalah akibat konflik politik seputar identitas kolektif daripada mencerminkan efisiensi (Hooghe & Marks, 2008).

Menurut Hooghe dan Marks, sejak Perjanjian Maastricht sudah tepat untuk berbicara tentang *dissensus*² yang membatasi publik Eropa. Integrasi Eropa telah menjadi isu yang sangat dipolitisasi, dan pembuat kebijakan saat ini tidak dapat mengabaikan opini publik. Perkembangan ini disebabkan oleh semakin menonjolnya isu-isu UE karena integrasi Eropa memiliki konsekuensi yang semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, dengan Kesepakatan Maastricht tahun 1991, pengambilan keputusan tentang integrasi Eropa memasuki dunia persaingan partai, pemilihan umum dan referendum yang kontroversial. Dalam upaya mencari legitimasi demokratis, para pembuat kebijakan UE membuka proses pengambilan keputusan yang dulunya terisolasi menjadi pengawasan publik. Warga negara Eropa diberi kesempatan untuk menyuarakan kritik mereka dalam pemilihan dan referendum nasional dan Eropa, dan perwakilan mereka di parlemen Eropa semakin sejajar dengan dewan Uni Eropa. Akibatnya, politisasi telah mengubah isi dan proses pengambilan keputusan politik di UE. Konflik politik baru seputar integrasi Eropa ini tidak mengikuti logika perpecahan kiri-kanan, melainkan melalui dimensi non-ekonomi, mulai dari hijau/ alternatif/ libertarian hingga tradisionalisme/ otoritas/ nasionalisme. Hooghe dan Marks berpendapat bahwa apakah individu melihat diri mereka sebagai milik eksklusif komunitas nasional atau sebagai orang Eropa adalah inti dari perpecahan ini. Konflik tentang integrasi Eropa terkait dengan imigrasi, semakin membentuk struktur politik Eropa dan domestik secara umum (Hooghe, et al., 2016).

Menurut perspektif postfungsionalis, munculnya identitas Eropa di kalangan massa dimungkinkan dan tidak serta merta merugikan identitas nasional. Namun, Hooghe dan Marks (2009) berpendapat bahwa identitas kolektif sangat stabil dan pergeseran dari identitas nasional eksklusif ke Eropa terjadi pada kecepatan yang jauh lebih lambat daripada pembangunan institusi Eropa. Mengacu pada data survei hingga tahun 2009, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada bukti pergeseran agregat menuju identitas nasional yang kurang eksklusif sejak awal 1990-an. Sampai perubahan generasi dimulai, Eropa dihadapkan pada ketegangan antara perubahan yurisdiksi yang cepat dan identitas yang relatif stabil. Ringkasnya, postfungsionalisme menekankan politisasi identitas nasional eksklusif yang membatasi proses dan isi integrasi Eropa. Peningkatan saluran representasi demokratis dan meningkatnya keterlibatan pembuat keputusan Uni Eropa di bidang

²Menurut Collins English Dictionary, pengertian *dissensus* adalah ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok.

kekuatan negara inti telah meningkatkan arti-penting politik integrasi Eropa dan telah menghubungkannya lebih erat dengan identitas kolektif. Sementara identitas Eropa massal dimungkinkan, konstruksinya jauh lebih lambat daripada pembangunan institusi Eropa (Kuhn, 2019).

3. Hasil Penelitian dan Diskusi

Argumen utama diperlukan sebagai jawaban sementara dalam rumusan masalah yang ada. Argumen utama ditulis berdasarkan latar belakang dan landasan konseptual yang menjadi alat untuk menganalisis sebuah masalah. Berdasarkan latar belakang dan teori yang ada, argumen utama yang dapat ditulis adalah penyebab penolakan Parlemen Inggris terhadap kebijakan *backstop* dalam kasus Britain Exit dikarenakan adanya konstruksi sosial dari Partai Unionist Demokratik Irlandia Utara (DUP) yang menduduki 18 kursi di Parlemen Inggris dengan berasumsi bahwa kebijakan *Backstop* akan membuat Inggris bergantung pada aturan Uni Eropa dan akan memberikan momentum bagi mereka yang ingin menyatukan kembali Irlandia. Selain itu, banyak anggota parlemen Inggris yang pro-Brexit berpendapat bahwa ini akan membuat Inggris menjadi "negara bawahan", karena dalam kebijakan *Backstop* Irlandia Utara masih mengikuti peraturan Uni Eropa dan tidak dapat melakukan kesepakatan perdagangannya sendiri di seluruh dunia dan masih diawasi oleh hakim UE. Hal ini juga akan membuka peluang intervensi dari Uni Eropa kedalam wilayah Inggris. Kemudian, Parlemen Inggris juga mengkritik pemberlakuan kebijakan *backstop* tanpa adanya jangka waktu. Tanpa adanya pembatasan waktu berarti akan semakin menyulitkan perekonomian Inggris. Jika *backstop* diterapkan, Inggris akan kesulitan menjalin kerja sama dengan Negara lain dikarenakan tidak adanya batasan waktu dari Brexit.

Penolakan Dari Partai *Democratic Unionist Party* (DUP)

Partai Unionis Demokratik (DUP) adalah sebuah partai politik unionis dan loyalis di Irlandia Utara. Didirikan pada tahun 1971 selama Troubles oleh Ian Paisley, yang memimpin partai selama 37 tahun berikutnya. Saat ini dipimpin oleh Jeffrey Donaldson, itu adalah partai gabungan terbesar di Majelis Irlandia Utara, dan merupakan partai terbesar kelima di *House of Commons* Inggris. Partai tersebut digambarkan sebagai sayap kanan dan secara sosial konservatif, anti-aborsi dan menentang pernikahan sesama jenis. DUP melihat dirinya sebagai membela Inggris dan budaya Protestan Ulster melawan nasionalisme Irlandia. Partai ini Eurosceptic dan mendukung Brexit. DUP berevolusi dari Protestant Unionist Party dan secara historis memiliki hubungan kuat dengan *Free Presbyterian Church of Ulster*, gereja yang didirikan Paisley. DUP menentang pembagian kekuasaan dengan nasionalis atau republikan Irlandia sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, dan juga menolak upaya untuk melibatkan Republik Irlandia dalam urusan Irlandia Utara. Ia berkampanye menentang Perjanjian Sunningdale tahun 1973, Perjanjian Anglo-Irlandia tahun 1985, dan Perjanjian Jumat Agung tahun 1998. Pada tahun 1980-an, DUP terlibat dalam mendirikan gerakan paramiliter loyalis Angkatan Ketiga dan Perlawanan Ulster, yang terakhir membantu menyelundupkan pengiriman besar senjata ke Irlandia Utara (McGrath, 2019).

Dalam sejarah DUP, *Ulster Unionist Party* adalah partai unionis terbesar di Irlandia Utara, tetapi pada tahun 2004 DUP telah mengambil alih UUP dalam hal kursi di Majelis Irlandia Utara dan House of Commons Inggris. Pada tahun 2006,

DUP ikut menandatangani Perjanjian St Andrews dan pada tahun berikutnya setuju untuk masuk ke dalam pemerintahan devolusi pembagian kekuasaan dengan Sinn Féin, yang setuju untuk mendukung Dinas Kepolisian, pengadilan, dan supremasi hukum. Paisley menjadi Menteri Pertama bersama Irlandia Utara. Namun, satu-satunya Anggota DUP Parlemen Eropa (MEP), Jim Allister, dan tujuh anggota dewan DUP meninggalkan partai sebagai protes, mendirikan Suara Unionis Tradisional. Paisley digantikan sebagai pemimpin DUP dan Menteri Pertama oleh Peter Robinson (2008–2015), kemudian oleh Arlene Foster (2015–2021). Setelah dia digulingkan, Edwin Poots sempat menjadi pemimpin tetapi dia sendiri terpaksa mundur setelah tiga minggu. Pada bulan Juni 2021, ia digantikan oleh Jeffrey Donaldson. Partai Unionis Demokratik adalah anggota serikat Ulster, yang berarti bahwa mereka mendukung Irlandia Utara yang tersisa sebagai bagian dari Britania Raya dan menentang Irlandia bersatu. Partai ini melihat dirinya membela Inggris dan budaya Protestan Ulster melawan nasionalisme dan republikanisme Irlandia. DUP menegaskan bahwa budaya Irlandia dan Gaelik tidak boleh dibiarkan mendominasi pendanaan di Irlandia Utara dan telah memblokir undang-undang yang diusulkan yang akan mempromosikan dan melindungi bahasa Irlandia. DUP adalah pendukung setia pasukan keamanan Inggris dan peran mereka dalam konflik Irlandia Utara. Partai ini ingin mencegah tentara dan polisi Inggris dituntut atas pembunuhan yang dilakukan selama konflik (Serhan, 2018).

Partai tersebut juga digambarkan sebagai populis sayap kanan dan mengandung beberapa tendensi ekstremis. Ini terkait dengan faksi loyalis Ulster dari unionisme, yang telah diidentifikasi sebagai bentuk nasionalisme etnis. DUP disahkan dalam pemilihan umum tahun 2017 oleh Dewan Komunitas Loyalis, sebuah kelompok payung dari kelompok paramiliter loyalis, yang merupakan organisasi teroris terlarang. DUP adalah partai *Eurosceptic* yang mendukung penarikan Inggris dari Uni Eropa dalam referendum Brexit tahun 2016 dan merupakan satu-satunya partai di eksekutif kekuatan Stormont yang mengkampanyekan Brexit. Partai tersebut menentang perbatasan keras Irlandia, dan ingin mempertahankan Area Perjalanan Umum. Anggota parlemen *East Antrim* Sammy Wilson menimbulkan kontroversi pada bulan Maret 2016 selama episode BBC Spotlight membahas implikasi dari referendum Uni Eropa, ketika ia tercatat setuju dengan anggota masyarakat yang mengatakan bahwa mereka ingin meninggalkan Uni Eropa. Wilson mengklaim dia setuju dengan keinginan untuk meninggalkan Uni Eropa, bukan seruan "keluar etnis". Wilson dikritik oleh konsul Polandia di Irlandia Utara dan berbagai partai politik lainnya. DUP sangat menentang backstop Irlandia Utara pada tahun 2019 karena melihatnya sebagai melemahkan tempat Irlandia Utara di Inggris Raya, dan oposisi ini dianggap oleh sejumlah komentator sebagai alasan utama mengapa perjanjian penarikan tidak diratifikasi oleh Parlemen Inggris sebelum tahun 2020. Sejak tahun 2018, DUP mengatakan bahwa penghalang Irlandia Utara harus dihapus dari perjanjian penarikan Brexit jika mereka ingin terus mendukung pemerintahan Theresa May di House of Commons, meskipun partai tersebut mengatakan bahwa itu terbuka sampai batas waktu di backstop. DUP memilih "Tidak" di ketiga suara yang berarti pada Perjanjian Penarikan UE yang dinegosiasikan oleh Theresa May (Merrick, 2019).

Kekhawatiran Parlemen Inggris Bahwa Kebijakan Backstop Irlandia Dapat Membuat Ketergantungan Terhadap Uni Eropa

Protokol Irlandia merupakan upaya pertama yang ditolak untuk menyelesaikan trilemma. Backstop (juga secara resmi disebut Protokol Irlandia Utara) adalah lampiran dari rancangan perjanjian penarikan Brexit yang dikembangkan oleh pemerintahan Theresa May dan Komisi Eropa pada bulan Desember 2017 dan diselesaikan pada bulan November 2018. Proposal ini diberikan kepada Inggris secara keseluruhan untuk memiliki wilayah pabean yang sama dengan UE hingga solusi diberikan yang akan menghindari perlunya kontrol bea cukai yang jelas di perbatasan Inggris Raya/UE di Irlandia dan juga menghindari kontrol bea cukai di Inggris Raya (antara Irlandia Utara dan Inggris Raya). Elemen backstop adalah bahwa pengaturan tersebut akan terus berlaku secara potensial tanpa batas waktu kecuali jika Inggris dan Uni Eropa bersama-sama menyetujui pengaturan yang berbeda untuk perbatasan di Irlandia. *Backstop* akan mengharuskan Irlandia Utara tetap berada di beberapa aspek Pasar Tunggal Eropa. Pemerintah Irlandia, Sinn Féin, SDLP dan Partai Aliansi lintas komunitas dan Partai Hijau mendukung proposal backstop, sedangkan DUP, UUP dan TUV menentang. Pada awal tahun 2019, Parlemen Westminster telah memilih tiga kali menentang meratifikasi versi Perjanjian Penarikan ini dan dengan demikian juga menolak *backstop* (Breen, 2021).

Setelah menjadi Perdana Menteri pada tanggal 24 Juli 2019, Boris Johnson berusaha menghapus penghalang yang ditolak oleh UE, yang menginginkan solusi operasional yang legal. Pada tanggal 2 Oktober, Johnson mempresentasikan pengganti potensial untuk *backstop* Irlandia tahun 2018, mengusulkan agar Irlandia Utara tetap selaras dengan UE dalam standar produk tetapi tetap berada di wilayah pabean Inggris. Ini akan memerlukan pemeriksaan produk antara Inggris Raya dan Irlandia Utara, tetapi tidak ada pemeriksaan bea cukai untuk barang-barang yang diperkirakan akan tetap berada di Inggris. Untuk perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik, proposalnya akan memerlukan pemeriksaan pabean antara Irlandia Utara dan Republik (berpotensi dibantu oleh teknologi yang tidak ditentukan yang diterapkan jauh dari perbatasan) tetapi tidak ada pemeriksaan standar produk dan keamanan di pulau Irlandia sehingga hal ini ditolak oleh UE (Frazee, 2019).

Banyak anggota parlemen mengkritik hambatan tersebut karena dua alasan utama. Bahwa itu akan mengarah pada peraturan yang berbeda untuk Irlandia Utara dibandingkan dengan Inggris Raya lainnya (yang menurut sebagian orang mengancam integritas Inggris), dan bahwa Inggris tidak akan dapat meninggalkan penghalang tanpa persetujuan UE. Perjanjian penarikan mengatakan bahwa Inggris dan Uni Eropa dapat menyingkirkan persyaratan *backstop*, tetapi hanya jika Inggris dan Uni Eropa setuju tidak perlu untuk menghindari perbatasan keras di Irlandia. Dengan kata lain, Inggris tidak dapat memilih keluar dari *backstop* Irlandia jika UE merasa bahwa solusi alternatif apa pun tidak akan berhasil. UE dan Inggris sama-sama mengatakan mereka tidak ingin *backstop* digunakan tetapi ini tidak cukup menjamin bagi beberapa anggota parlemen yang merasa bahwa *backstop* dapat berarti Inggris tetap selaras dengan UE tanpa batas. Parlemen memberikan suara menentang perjanjian penarikan pada bulan Januari 2019, untuk pertama kalinya. Pada bulan Maret 2019, pemerintah Inggris dan UE menyetujui "instrumen" tambahan di *backstop*, yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah ini. Menurut pendapat Jaksa Agung (penasihat hukum kepala pemerintah), instrumen ini mengurangi kemungkinan bahwa Inggris akan tetap berada di belakang di luar

kehendaknya jika UE menghalangi negosiasi mengenai pengaturan hubungan di masa depan dengan itikad buruk. Namun nasihat hukum juga mengatakan bahwa, jika tidak ada itikad buruk dari pihak UE yang dapat dibuktikan, instrumen tersebut tidak mengurangi kemungkinan bahwa Inggris dapat ditahan di belakang. Dalam praktiknya, ini berarti Inggris tidak dapat secara sepihak meninggalkan penghalang dalam skenario di mana kebuntuan telah dicapai antara Inggris dan UE, bukan melalui kegagalan yang dapat dibuktikan oleh salah satu pihak, tetapi hanya karena perbedaan yang tidak dapat diselesaikan (Cooper, 2018).

Perjanjian penarikan, ditambah “instrumen” baru di *backstop*, ditolak oleh parlemen pada bulan Maret 2019. Perbatasan Irlandia dipilih oleh Inggris dan Uni Eropa sebagai penghalang karena pentingnya bagi proses perdamaian Irlandia Utara. Perjanjian Jumat Agung tahun 1998 adalah bagian penting dari proses perdamaian ini. Salah satu dari tiga poin utama perjanjian tersebut adalah menciptakan infrastruktur untuk “kerja sama Utara-Selatan” antara pemerintah Irlandia dan Majelis Irlandia Utara yang baru dibentuk. Kerja sama lintas batas ini merupakan bagian dari strategi ‘normalisasi’ hubungan antara komunitas Protestan dan Katolik di Irlandia Utara dan lintas perbatasan menurut *Institute for Government*. Bagian penting dari ‘normalisasi’ dan proses kerja sama ini adalah pembukaan perbatasan, yang sebelumnya dijaga oleh tentara Inggris. Saat ini, tidak ada pemeriksaan sama sekali pada orang atau barang saat mereka bergerak antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia, dan perdagangan melintasi perbatasan bernilai £4 miliar pada tahun 2016. Pemerintah Irlandia mengatakan bahwa perbatasan terbuka adalah “simbol yang paling nyata dari Proses Perdamaian”. (Sandford, 2020)

Ketakutan Parlemen Inggris Akan Penyatuan Kembali Irlandia

Ada kekhawatiran di antara anggota Parlemen Inggris bahwa kebijakan *Backstop* adalah upaya terselubung untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas wilayah tersebut untuk mempromosikan Irlandia bersatu, sebuah posisi yang disangkal oleh pemerintah Irlandia. Partai Persatuan Demokratik (DUP) menentang perbatasan keras Irlandia dan ingin mempertahankan Area Perjalanan Umum. DUP adalah satu-satunya partai besar di Irlandia Utara yang menentang Perjanjian Jumat Agung. Referendum tentang reunifikasi Irlandia diusulkan oleh pemimpin Sinn Féin Martin McGuinness segera setelah hasil referendum Brexit diumumkan, sikap yang ditegaskan kembali oleh pemimpin partai baru Mary Lou McDonald pada tahun 2018. Seminggu setelah referendum Brexit, Menteri Pertama Irlandia Utara saat itu, Arlene Foster dari DUP dan Wakil Menteri Pertama Martin McGuinness mengeluarkan surat bersama di mana mereka mengatakan bahwa perbatasan tidak boleh menjadi katalis untuk aktivitas ilegal atau menciptakan insentif bagi mereka yang ingin merusak proses perdamaian (Connelly, 2018).

Komitmen DUP untuk mempertahankan Serikat tidaklah mengejutkan. Yang mendasarinya adalah beberapa kekhawatiran tambahan yang saling terkait. Yang pertama menyangkut status Irlandia Utara dan segala upaya (nyata atau anggapan) bahwa Brexit dapat menjadi sarana bagi nasionalis untuk mengejar agenda unifikasi. Kemarahan DUP yang cukup besar atas *backstop* telah diarahkan ke Dublin, yang mencerminkan ketakutan atas upaya untuk menyatukan Irlandia dengan 'diam-diam'. Ketakutan ini digabungkan di beberapa tempat dengan kesulitan dalam menerima pentingnya dan pengaruh Dublin yang tinggi dalam negosiasi dan persatuan yang ditunjukkan oleh UE²⁷. Hal yang mendasari kekhawatiran tersebut adalah

keprihatinan atas kemungkinan pengkhianatan serikat pekerja oleh London. Apa pun klaim anggota parlemen Brexiter seperti Boris Johnson, Dominic Raab dan Jacob Rees-Mogg, DUP khawatir bahwa mereka dapat 'meninggalkan Irlandia Utara jika itu berarti Brexit bersih untuk seluruh Inggris'. DUP akan mengawasi ketat persaingan kepemimpinan Partai Konservatif, berharap Theresa May akan digantikan oleh seseorang yang lebih bersimpati pada posisinya dan bersedia mengupayakan pembukaan kembali Perjanjian Penarikan. Calon terdepan saat ini Boris Johnson telah terungkap telah mendukung pemeriksaan barang yang bergerak antara Irlandia Utara dan Inggris Raya untuk memastikan perbatasan lunak setelah Brexit (Holden, 2020).

Kebijakan *Backstop* muncul ketika Inggris menolak proposal UE untuk melembagakan pemeriksaan pabean di Laut Irlandia. Menjaga kesinambungan antara Inggris Raya dan Irlandia Utara adalah tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan dari pihak Partai Persatuan Demokratik (DUP). Hal ini penting karena dukungan DUP sangat penting bagi mantan Perdana Menteri Theresa May. Pemerintah May merujuk dalam kertas putih Brexit pertamanya ke Perjanjian Belfast dan menegaskan kembali kepatuhan Inggris pada kerangka konstitusional yang ditetapkan pada tahun 1998. Penghalangnya adalah produk dari apa yang berulang kali disebut May sebagai "garis merah." Hasil mereka adalah bahwa memperluas perbatasan perdagangan ke seluruh Inggris adalah satu-satunya pilihan yang layak dan UE dengan enggan menyetujui *backstop*. Sementara penolakan terhadap *backstop* dapat dimengerti secara politis, membongkar Perjanjian Jumat Agung tidak dapat diterima. Perjanjian tersebut membawa kemungkinan bahwa provinsi Utara menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Republik Irlandia dan berfungsi sebagai "kewajiban yang mengikat pada kedua pemerintah untuk memperkenalkan dan mendukung undang-undang Parlemen masing-masing untuk mewujudkan keinginan itu." Satu-satunya cara untuk mengetahui apa keinginan itu adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada warga Irlandia Utara. Sebuah kasus baru-baru ini, dan dalam beberapa hal serupa, menunjukkan bahwa ini masuk akal secara politis. Pengalaman Prancis dengan konflik yang melibatkan Kaledonia Baru pada tahun 1998 memberikan pelajaran dalam hal ini. Pada saat itu, Perdana Menteri saat itu Michel Rocard merundingkan kesepakatan antara "Unionis" Prancis dan "Independen" Kanack. Perjanjian ini, yang mengantarkan periode panjang perdamaian sipil, termasuk referendum prospektif tentang masa depan wilayah tersebut. Referendum itu berlangsung tanpa insiden pada bulan November 2018. Partisipasi tinggi (81 persen) dan mayoritas memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis (56,7 persen) (Lagana, 2020).

Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan 55 persen responden [di Irlandia Utara] pasti akan atau mungkin mendukung Irlandia Bersatu jika Inggris pergi tanpa kesepakatan, proporsi ini turun menjadi 48 persen jika Inggris akan pergi dengan persyaratan Perjanjian Penarikan dan hanya 29 persen jika Inggris tetap berada di UE. Apa pun hasil pemungutan suara yang sebenarnya, ini setidaknya menunjukkan bahwa perpecahan historis mungkin tidak terlalu penting bagi pemilih Irlandia Utara daripada ancaman dari Brexit. Perjanjian Belfast sangat jelas tentang organisasi referendum di Irlandia Utara. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Menteri luar negeri akan menjalankan kekuasaan [memegang hak suara] jika, sewaktu-waktu, tampaknya mayoritas dari mereka yang memberikan suara akan menyatakan keinginan agar Irlandia Utara berhenti menjadi bagian dari Inggris dan merupakan

bagian dari Irlandia Bersatu. Tidak ada yang dapat meramalkan hasil referendum, tetapi fakta bahwa orang-orang Irlandia Utara memilih "tetap" pada tahun 2016 (dengan mayoritas 2-1) adalah petunjuk yang cukup bahwa keinginan orang-orang saat ini mungkin pantas untuk dikhawatirkan (Daly, 2019).

Secara historis, jajak pendapat penduduk Irlandia Utara secara konsisten menunjukkan mayoritas menentang Irlandia Bersatu dan mendukung Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Misalnya, dalam survei bulan November 2015 oleh RT dan BBC, 30% populasi menyatakan dukungan untuk Irlandia Bersatu dalam hidup mereka dengan 43% menentang dan 27% ragu-ragu. Namun, ketika ditanya tentang status Irlandia Utara dalam jangka pendek hingga menengah, dukungan untuk persatuan lebih rendah sekitar 13% dari populasi. Survei tahunan Northern Ireland Life and Times tahun 2013 yang dilakukan oleh *Queen's University Belfast* dan *Ulster University* menemukan bahwa Irlandia bersatu adalah pilihan jangka panjang yang disukai 15% dari populasi sementara sisa bagian dari Kerajaan Inggris adalah pilihan jangka panjang yang disukai 66 % dari populasi. Ketika survei yang sama dilakukan pada tahun 2015, dukungan mencapai 22%. Pada tahun 1973, penduduk Irlandia Utara diberikan referendum mengenai apakah Irlandia Utara harus tetap menjadi bagian dari Britania Raya atau bergabung dengan Republik Irlandia untuk membentuk Irlandia bersatu. Hasilnya adalah 98,9% mendukung persatuan dengan seluruh Inggris, tetapi jajak pendapat itu sangat diboikot oleh kaum nasionalis, oleh karena itu jumlah pemilih adalah 58,7%. Namun suara pro-Inggris mewakili 57,5% dari seluruh pemilih, meskipun ada boikot. Ketentuan untuk referendum di masa depan dimasukkan dalam Perjanjian Jumat Agung dan Undang-Undang Irlandia Utara Tahun 1998. Banyak orang Protestan Unionis di Irlandia Utara berpendapat bahwa mereka memiliki identitas berbeda yang akan dikuasai di Irlandia yang bersatu. Mereka mengutip penurunan populasi Protestan kecil Republik Irlandia sejak kemerdekaan dari Inggris, biaya ekonomi unifikasi, tempat mereka di pemain internasional kunci di Inggris dan nenek moyang mereka terutama non-Irlandia. Orang-orang serikat pekerja di Irlandia Utara terutama menemukan identitas budaya dan etnis mereka dari penjajah Skotlandia dan Inggris, yang keturunannya dapat ditemukan di tiga kabupaten Ulster yang diperintah oleh Republik Irlandia. Orang-orang seperti itu merayakan warisan Skotlandia mereka setiap tahun seperti rekan-rekan mereka di enam kabupaten lainnya (Meredith, 2018).

4. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor alasan penolakan Parlemen Inggris terhadap Kebijakan Backstop Irlandia. Dengan menggunakan konsep konstruktivisme dan *postfunctionalist*, skripsi ini berargumen bahwa penyebab penolakan Parlemen Inggris terhadap kebijakan *backstop* dalam kasus Britain Exit dikarenakan adanya konstruksi sosial dari Partai Unionist Demokratik Irlandia Utara (DUP) yang menduduki 18 kursi di Parlemen Inggris dengan berasumsi bahwa kebijakan *Backstop* akan membuat Inggris bergantung pada aturan Uni Eropa dan akan memberikan momentum bagi mereka yang ingin menyatukan kembali Irlandia. Selain itu, banyak anggota parlemen Inggris yang pro-Brexit berpendapat bahwa ini akan membuat Inggris menjadi "negara bawahan", karena dalam kebijakan *Backstop* Irlandia Utara masih mengikuti peraturan Uni Eropa dan tidak dapat melakukan kesepakatan perdagangannya sendiri di seluruh dunia dan masih diawasi oleh hakim UE. Hal ini juga akan membuka peluang intervensi dari Uni Eropa kedalam wilayah

Inggris. Kemudian, Parlemen Inggris juga mengkritik pemberlakuan kebijakan *backstop* tanpa adanya jangka waktu. Tanpa adanya pembatasan waktu berarti akan semakin menyulitkan perekonomian Inggris. Jika *backstop* diterapkan, Inggris akan kesulitan menjalin kerjasama dengan Negara lain dikarenakan tidak adanya batasan waktu dari Brexit.

Penolakan dari Partai DUP menjadi salah satu alasan penolakan Parlemen Inggris terhadap Kebijakan *Backstop*. Partai Persatuan Demokratik (DUP) menentangnya karena akan memperkenalkan perbedaan peraturan antara Irlandia Utara dan Inggris Raya lainnya, yang dilihatnya sebagai ancaman bagi tempat Irlandia Utara di Uni Eropa. Namun, mayoritas orang di Irlandia Utara mendukung *backstop*, karena memberi mereka akses istimewa ke pasar Inggris dan UE. Pada bulan Januari 2019, pemerintah Inggris Raya menerbitkan proposal tentang bagaimana Inggris Raya, termasuk eksekutif Irlandia Utara, dapat memengaruhi keputusan untuk menggunakan *backstop* dan tata kelolanya jika itu mulai berlaku, serta komitmen bahwa seluruh Inggris Raya akan menyelaraskan secara sepihak dengan peraturan pasar tunggal yang diterapkan di Irlandia Utara. Brexiteers lainnya menentang *backstop* karena itu berarti Inggris tetap berada di wilayah pabean dengan UE, menghilangkan kemampuan Inggris untuk memvariasikan tarifnya sebagai komponen utama dari kesepakatan perdagangan. Ada juga kekhawatiran bahwa Inggris tidak akan dapat meninggalkan *backstop*. Itu dimaksudkan untuk menerapkan “kecuali dan sampai” pengaturan alternatif, yang disepakati kedua belah pihak, dapat menggantikannya.

Selain itu, ada kekhawatiran di antara anggota Parlemen Inggris bahwa kebijakan *Backstop* adalah upaya terselubung untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas wilayah tersebut untuk mempromosikan Irlandia bersatu, sebuah posisi yang disangkal oleh pemerintah Irlandia. Partai Persatuan Demokratik (DUP) menentang perbatasan keras Irlandia dan ingin mempertahankan Area Perjalan Umum. DUP adalah satu-satunya partai besar di Irlandia Utara yang menentang Perjanjian Jumat Agung. Referendum tentang reunifikasi Irlandia diusulkan oleh pemimpin Sinn Féin Martin McGuinness segera setelah hasil referendum Brexit diumumkan, sikap yang ditegaskan kembali oleh pemimpin partai baru Mary Lou McDonald pada tahun 2018. Seminggu setelah referendum Brexit, Menteri Pertama Irlandia Utara saat itu, Arlene Foster dari DUP dan Wakil Menteri Pertama Martin McGuinness mengeluarkan surat bersama di mana mereka mengatakan bahwa perbatasan tidak boleh menjadi katalis untuk aktivitas ilegal atau menciptakan insentif bagi mereka yang ingin merusak proses perdamaian.

Kekhawatiran tentang dampak Brexit pada proses perdamaian dan perbatasan Irlandia, khususnya oleh nasionalis selama debat referendum Uni Eropa. Keanggotaan UE telah memainkan peran penting dalam politik Irlandia Utara. Hal ini telah menjadi faktor politik, ekonomi dan psikologis yang signifikan yang memungkinkan serikat pekerja dan nasionalis untuk berkolaborasi dan telah menjadi sarana untuk menjaga hubungan dengan Republik Irlandia. Berbeda dengan partai-partai utama Irlandia Utara yang sikapnya terhadap UE tidak mencerminkan “sistem partai ganda etnis”, penduduk Irlandia Utara tampaknya masih terbagi menurut garis komunitas, sebagaimana ditegaskan oleh hasil referendum Brexit. Bahkan jika sebagian besar penduduk memilih untuk tetap berada di UE (dengan mayoritas 55,8% berbanding 44,2%), ada kesenjangan antara konstituen serikat pekerja dan nasionalis. Sebagian besar konstituen serikat pekerja mayoritas, tujuh dari sepuluh

(di antara delapan belas konstituen Irlandia Utara), memilih untuk keluar, sedangkan semua wilayah mayoritas nasionalis memilih untuk tetap berada di UE. Akibatnya, ini berarti bahwa ketegangan antarkomunitas dapat dihidupkan kembali, terutama karena keanggotaan UE adalah masalah yang sensitif.

DaftarPustaka

- Adam, J. (2020, December 25). *EU Rules Out Brexit Renegotiation, Vows to Avoid Irish Backstop With Free Trade Deal Before 2021*. Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/en/eu-rules-out-brexit-renegotiation-vows-to-avoid-irish-backstop-with-free-trade-deal-before-2021/a-46731802>
- Adler, I. (1997). Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. *European Journal of International Relations*, 319-324.
- Amadeo, K. (2022, January 24). *What Was Brexit, and How Did It Impact the UK, the EU, and the US?* Diambil kembali dari The Balance: <https://www.thebalance.com/brexit-consequences-4062999>
- Amartya Sen. (2008). *Rational Behaviour*. London: Palgrave Macmillan Publishing.
- Andreopoulos, G. J. (2019, April 13). *Extradition Law*. Diambil kembali dari Britannica.com: <https://www.britannica.com/topic/extradition>
- Baciu, C., & Doyle, J. (2019). Peace, Security and Defence Cooperation in Post-Brexit Europe. *Springer*, 3-8.
- Barker, A., & Brunson, J. (2018, November 15). *Flaws in Brexit Backstop Store Up Trouble For UK and EU*. Diambil kembali dari Financial Times: <https://www.ft.com/content/6b6f8a98-e811-11e8-8a85-04b8afea6ea3>
- BBC. (2020, December 30). *Brexit: What You Need To Know About The UK Leaving the EU*. Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>
- Blumberg, P. (1968). *Industrial Democracy: The Sociology of Participation*. London: Constable.
- Boffey, D. (2019, September 10). *A Northern Ireland- Only Backstop: What is it and Will Anyone Go For It?* Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/10/a-northern-ireland-only-backstop-what-is-it-and-will-anyone-go-for-it>
- Breen, S. (2021, January 21). *DUP Rejects Suggestion Party Should Have Agreed to Theresa May's Backstop*. Diambil kembali dari <https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/brexit/dup-rejects-suggestion-party-should-have-agreed-to-theresa-mays-backstop-39993067.html>
- Britannica. (2018, June 12). *Neorealism*. Diambil kembali dari britannica.com: <https://www.britannica.com/topic/neorealism-political-and-social-science>
- Bruton, J. (2021, May 13). *Why Brexit Affects Ireland*. Diambil kembali dari Wilson Center: <https://www.wilsoncenter.org/article/why-brexit-affects-ireland>
- Campbell, J. (2019, October 16). *Brexit: What are The Backstop Options?* Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-politics-44615404>

- Campbell, J. (2019, October 16). *Brexit: What Are The Backstop Options?* Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-politics-44615404>
- Carroll, R., & O'Carroll, L. (2019, April 18). *How The Irish Backstop Emerged as May's Brexit Nemesis.* Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/18/how-the-irish-backstop-emerged-as-mays-brexit-nemesis>
- Carswell, S. (2018, October 12). *Brexit Explained: Why Does The Border Matter and What is The Backstop?* Diambil kembali dari Irish Times: <https://www.irishtimes.com/news/politics/brexit-explained-why-does-the-border-matter-and-what-is-the-backstop-1.3661518>
- Claire, M. (2020). Brexit and the Irish border issue : from May's deal to Johnson's deal. *Open Edition Journal*, 1-7.
- Cohen, T. (2010). Conflict Resolution. *The Corsini Encyclopedia of Psychology*, 2-7.
- Connelly, T. (2018). *Brexit and Ireland: The dangers, the opportunities, and the inside story of the Irish response.* London: Penguin.
- Connor, R. (2018, October 15). *Brexit: Theresa May Proposes UK-Wide Customs Backstop.* Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/en/brexit-theresa-may-proposes-uk-wide-customs-backstop/a-45896918>
- Cooper, C. (2018, November 22). *Brexit: What Happens If MPs Reject The Deal?* Diambil kembali dari Politico: <https://www.politico.eu/article/uk-brexit-what-happens-if-theresa-may-deal-is-rejected-by-british-parliament/>
- Creighton, L. (2019). The Harder The Brexit, The Harder The Impact on Northern Ireland. *General Affair Journal*, 2-7.
- Cristol, J. (2019, November 4). *Liberalism.* Diambil kembali dari Oxford Bibliographies: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0060.xml>
- Daly, B. (2019, September). *The "Backstop" Explained.* Diambil kembali dari <https://home.kpmg/ie/en/home/insights/2019/09/preparing-for-brexit-the-backstop-explained.html>
- Deudney, D., & Ikenberry, G. J. (1999). *Liberal World: The Resilient Order.* Princeton: Princeton University.
- Diamond, L. (1989). *Politics in Developing Countries: Latin America.* Boulder: L. Rienner Publishers.
- Donnelly, J. (2000). *Realism and International Relations.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Doyle, M. W. (1986). Liberalism and World Politics. *American Political Science*, 1151–1169.
- Edgington, T. (2019, March 29). *Brexit: What Deal Did MPs Reject?* Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-47745831>
- Edgington, T., & Morris, C. (2020, February 3). *Brexit: What's The Northern Ireland Protocol?* Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/explainers-53724381>

- Elbaum, R. (2019, January 23). *What Is Irish Backstop, and Why Has It Complicated Brexit?* Diambil kembali dari NBC: <https://www.nbcnews.com/storyline/brexit-referendum/what-irish-backstop-why-has-it-complicated-brexit-n961161>
- European Commission. (2018). *Fact Sheet: Protocol on Ireland and Northern Ireland*. London: European Commission.
- European Commission. (2020). *Questions and Answers on the United Kingdom's withdrawal from the European Union on 31 January 2020*. Brussels: European Commission.
- European Council. (2020, November 25). *Brexit Process*. Diambil kembali dari European Council: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/brexit-process/>
- Finlay, F. (2019, January 9). *DUP Rejects Theresa May's 'Fairly Meaningless' Proposal To Give North 'Veto' If Brexit Backstop Triggered*. Diambil kembali dari Irish Examiner: <https://www.irishexaminer.com/news/arid-30896552.html>
- Finnemore, M. (1996). *National Interests in International Society*. New York: Cornell University Press.
- Fleming, A. (2021, April 9). *Analysis: What is Brexit Doing to Northern Ireland?* Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-56678489>
- Forrest, J. (2021, October 29). *Solutions To The Impact of Brexit on Northern Ireland Trade*. Diambil kembali dari <https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2021/10/solutions-to-the-impact-of-brexit-on-northern-ireland-trade/>
- Fraser, D. (2021, December 21). *Brexit: The Economic Impact a Year On*. Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-59741804#:~:text=Isolating%20the%20Brexit%20effect%20suggests,new%20rules%20outside%20the%20EU>
- Frazer, G. (2019, January 15). *Parliament Just Rejected May's Brexit Deal. Now What?* Diambil kembali dari <https://www.pbs.org/newshour/world/parliament-just-rejected-mays-brexit-deal-now-what>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 23.
- Ganti, A. (2020, July 21). *Rational Choice Theory*. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/r/rational-choice-theory.asp>
- Geoghegan, P. (2019, January 29). *Brexit: Why is The Irish Backstop So Controversial?* Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/en/brexit-why-is-the-irish-backstop-so-controversial/a-47273841>
- Giles, C. (2021, December 23). *Brexit One Year On: The Impact On The UK Economy*. Diambil kembali dari Financial Times: <https://www.ft.com/content/c6ee4ce2-95b3-4d92-858f-c50566529b5e>
- Guzzini, S. (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. *European Journal of International Relations*, 147-182.
- Hayes, A. (2021, May 22). *Brexit*. Diambil kembali dari Investopedia.com: <https://www.investopedia.com/terms/b/brexit.asp>
- Held, D. (1987). *Models of Democracy*. Cambridge, UK: Polity Press.

- Holden, P. (2020). Territory, geoeconomics and power politics: The Irish government's framing of Brexit. *Political Geography*, 3-16.
- Holsti, K. (1983). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies*, 233-309.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2008). A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus. *Cambridge University Press*, 3-20.
- Hooghe, L., Marks, G., Schakel, A. H., Osterkatz, S. C., Niedzwiecki, S., & Shair-Rosenfield, S. (2016). *Measuring Regional Authority: A Postfunctionalist Theory of Governance, Volume I (Transformations in Governance) 1st Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Hughes, L. (2019, March 28). *DUP's Fixed Stance Blocks Theresa May's Way to Brexit Deal*. Diambil kembali dari Financial Times: <https://www.ft.com/content/27ac0b14-50d1-11e9-9c76-bf4a0ce37d49>
- Huntington, S. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Indian Express. (2021, November 6). *Explained: Why is There a Possibility Of a Trade War Between Northern Ireland and UK?* Diambil kembali dari Indian Express: <https://indianexpress.com/article/explained/explained-trade-war-northern-ireland-uk-7608843/>
- Institute For Government. (2020, February 24). *Irish Backstop*. Diambil kembali dari Institute For Government: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/irish-backstop>
- Irish Times. (2021, August 17). *The Irish Times View of the Impact of Brexit on Irish Trade: Temporary or Long Lasting?* Diambil kembali dari Irish Times: <https://www.irishtimes.com/opinion/editorial/the-irish-times-view-of-the-impact-of-brexit-on-irish-trade-temporary-or-long-lasting-1.4648607>
- Islam, F. (2021, December 24). *Brexit: One Year On, The Economic Impact is Starting To Show*. Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/business-59761292>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Jarvis, J., Collier, H., & Herbert, T. (2019, March 12). *What is the Irish backstop in Theresa May's Brexit deal?* Diambil kembali dari Evening Standard: <https://www.standard.co.uk/news/politics/irish-backstop-theresa-may-brexit-deal-a4051546.html>
- Kentish, B. (2019, February 5). *Theresa May Rules Out Replacing Irish Backstop in EU Deal After Brussels Trip Revealed*. Diambil kembali dari Independent: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-news-live-theresa-may-speech-irish-backstop-border-dup-conservatives-latest-a8763511.html>
- Krasner, S. D. (1978). *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Kuhn, T. (2019). Grand theories of European integration revisited: does identity politics shape the course of European integration? *Journal of European Public Policy*, 2-5.

- Lagana, G. (2020). *The European Union and the Northern Ireland peace process*. Chambridge: Springer.
- Lee, T. B. (2016, June 25). *Brexit: The 7 Most Important Arguments For Britain to Leave The EU*. Diambil kembali dari VOX: <https://www.vox.com/2016/6/22/11992106/brexit-arguments>
- Legislative Council Secretariat. (2015). *Extradition Treaty*. USA: Legislative Council Secretariat.
- Lenin, V. I. (1943). *State and Revolution*. New York: International Publishers.
- Lohmann, S. (2008). *Rational Choice and Political Science*. London: Palgrave Macmillan Publishing.
- Longley, R. (2020, October 13). *What is Extradition Definition and Example*. Diambil kembali dari <https://www.thoughtco.com/what-is-extradition-definition-and-examples-5082047>
- Macdonald, A. (2021, September 19). *Ireland's Brexit Backstop and Why It Matters*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-backstop-explainer-idUSKCN1LZ1VR>
- Masters, J. (2020, January 8). *What is Extradition?* Diambil kembali dari CFR: <https://www.cfr.org/background/what-extradition>
- McCormack, J. (2019, October 17). *Brexit Deal: Why Does the DUP's Opinion Matter?* Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-50086035>
- McGrath, D. (2019, October 13). *Timeline: How The DUP Went From 'Blood Red Lines' to a Brexit Compromise*. Diambil kembali dari The Journal: <https://www.thejournal.ie/dup-brexit-backstop-blood-red-line-arlene-foster-4846928-Oct2019/>
- McKeown, T. (2019, April 11). *Neorealism Theory*. Diambil kembali dari Oxford Bibliographies: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0037.xml>
- Mctague, T. (2019, January 27). *UK to Warn of Brexit Backstop's Threat to Irish Peace Treaty*. Diambil kembali dari Politico: <https://www.politico.eu/article/mays-brexit-assault-will-target-backstops-threat-to-peace-dup-theresa-may-good-friday-agreement/>
- Mearsheimer, J. J. (2013). *Structural Realism*. Oxford: Oxford University Press.
- Meredith, S. (2018, December 11). *What is The Irish Backstop? Here's Why It Has Taken Center Stage Amid Chaotic Brexit Negotiations*. Diambil kembali dari CNBC: <https://www.cnbc.com/2018/12/11/brexit-what-is-the-irish-backstop-and-why-does-it-matter.html>
- Merrick, R. (2019, March 28). *Theresa May's Brexit Deal Dead as DUP Says It Will Not Back Agreement 'Under Any Circumstances'*. Diambil kembali dari Independent: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-deal-dup-theresa-may-vote-commons-eu-a8843291.html>
- Mistral, J. (2019, August 15). *Brexit, The Irish Backstop, and The Good Friday Agreement*. Diambil kembali dari Brookings: <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/08/15/brexit-the-irish-backstop-and-the-good-friday-agreement/>

- Moravcsik, A. (1997). *Liberalism and International Relations Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mouffe, C. (1999). *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism? Prospects For Democracy*, 3.
- Mueller, B., & Robins, P. (2021, November 18). *What is Brexit? and How is It Going?* Diambil kembali dari New York Times: <https://www.nytimes.com/article/brexit-uk-eu-explained.html>
- New York Times. (2019, March 29). *Theresa May's Brexit Deal Is Rejected by UK Parliament*. Diambil kembali dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/03/29/world/europe/theresa-may-brexit.html>
- O'Carroll, L. (2019, October 17). *How is Boris Johnson's Brexit deal different from Theresa May's?* Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/17/how-is-boris-johnson-brexit-deal-different-from-theresa-may>
- OECD. (2021). *The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision*. London: OECD.
- Perez-Pena, R. (2019, January 30). *What is Irish Backstop, and Why is It Holding Up Brexit?* Diambil kembali dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/01/30/world/europe/irish-backstop-brexit.html>
- Perez-Pena, R. (2019, January 30). *What Is the Irish Backstop, and Why Is It Holding Up Brexit?* Diambil kembali dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2019/01/30/world/europe/irish-backstop-brexit.html>
- Plano, J. C., & Olton, R. (1982). *The International Politic Dictionary*. California: Clio Publisher.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2011). *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press.
- Reenen, J. V. (2019, September 12). *The Row Over the Irish Backstop Reveals a Lot About the Contradictions of Brexit*. Diambil kembali dari London School of Economics: <https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2019/09/12/the-row-over-the-irish-backstop-reveals-a-lot-about-the-contradictions-of-brexit/>
- Reuters. (2019, February 26). *DUP Cannot Back Brexit Deal Without 'Legally Watertight' Way Out Of Backstop*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-dodds-idUKKCN1QF1MB>
- Reuters. (2019, July 26). *Factbox: What is the Irish Backstop at The Heart Of Brexit Impasse?* Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-backstop-factbox-idUSKCN1UL265>
- Riley, A. (2016). *Brexit: Causes and Consequences*. CIDOB, 3-16.
- Rosati, J. (1995). *Foreign Policy Restructuring*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Rosenau, J. (1966). *Pre-theories and Theories of Foreign Policy*. Evanston: Northwestern University Press.
- Sandford, A. (2020, January 29). *What Was In Theresa May's Brexit Deal and Why Was It So Unpopular?* Diambil kembali dari Euro News: <https://www.euronews.com/2018/12/07/what-is-in-theresa-may-s-brexit-deal-and-why-is-it-so-unpopular>

- Sargeant, J. (2021, September 23). *Ireland and Brexit*. Diambil kembali dari <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/ireland-brexit>
- Sargeant, J. (2021, March 1). *Northern Ireland Protocol: Consent Mechanism*. Diambil kembali dari Institute For Government: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/northern-ireland-protocol-consent-mechanism>
- Schornig, N. (2014). *Neorealism*. New York: Routledge.
- Serhan, Y. (2018, October 17). *The Small Party Threatening to Topple Theresa May's Government*. Diambil kembali dari The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/10/dups-threat-topple-theresa-mays-government/573178/>
- Shirayev, E. B. (2014). *International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Skoutaris, N. (2019, October 18). *Whatever Happened To The Irish Backstop?* Diambil kembali dari <https://europeanlawblog.eu/2019/10/18/whatever-happened-to-the-irish-backstop/>
- Sloat, A. (2018, December 12). *Brexit Endgame: Theresa May's Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Week*. Diambil kembali dari Brookings: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/12/12/brexit-endgame-theresa-mays-terrible-horrible-no-good-very-bad-week/>
- Sloat, A. (2019, January 15). *Brexit Endgame: Parliament Votes Down Theresa May's Brexit Deal*. Diambil kembali dari Brookings: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/15/brexit-endgame-parliament-votes-down-theresa-mays-brexit-deal/>
- Smith, M. (2005). *Critical Theories of International Relations*. New York: Palgrave MacMillan.
- Smithey, L. (2011). *Unionists, Loyalists, and Conflict Transformation in Northern Ireland*. Oxford: Oxford University Press.
- Snidal, D. (2013). *Rational Choice and International Relations*. London: SAGE.
- United Nations. (2004). *Model Law on Extradition*. Geneva: United Nations.
- Wallenfeldt, J. (2020, May 12). *EU Agreement, The Call For Another Referendum, and The Irish Backstop*. Diambil kembali dari Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Theresa-May/EU-assurances-and-the-second-meaningful-vote>
- Wallensteen, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution*. London: SAGE Publication Ltd.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 395-413.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Whiteley, P. (2017, May 23). *Insight: Why Britain Really Voted To Leave the European Union?* Diambil kembali dari Essex:

<https://www.essex.ac.uk/research/showcase/why-britain-really-voted-to-leave-the-european-union>

World Politics Review. (2022, February 11). *Britain's Uncertain Future After Brexit*. Diambil kembali dari World Politics Review: <https://www.worldpoliticsreview.com/insights/28072/irish-backstop-brexite-are-still-major-challenges-for-johnson>

World Politics Review. (2022, February 11). *Britain's Uncertain Future After Brexit*. Diambil kembali dari World Politics Review: <https://www.worldpoliticsreview.com/insights/28072/irish-backstop-brexite-are-still-major-challenges-for-johnson>

Wright, N. (2019). Northern Ireland, the Backstop and No Deal. *UCL European Institute Journal*, 2-6.

Wydra, H. (2009). *Communism and the Emergence of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

